

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada Kantor Camat Lima Puluh Pesisir

Kamilah, K^{1*} Nur Aini²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹kamila@uinsu.ac.id, ²uinsu2821@gmail.com

ABSTRACT

The management of the regional financial accounting system can be done by providing information and disclosure of the government's financial performance. In general, village financial management has not kept accounting records in accordance with generally accepted accounting principles. For example, at the end of the year do not make adjustments (stock taking) inventory, and calculation of depreciation on assets. The budget is determined based on an estimate of future activities, whether or not the estimate is correct depends on the experience and intelligence of the estimator/projector, if there is an inaccuracy it can disrupt the planning, coordination and supervision.

Keywords: Financial Accounting, Budget Implementation, Transparency.

ABSTRAK

Pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan pengungkapan atas kinerja keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan desa secara umum belum menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Misalnya, pada akhir tahun tidak melakukan penyesuaian (stock opname) persediaan, dan perhitungan penyusutan terhadap aset. Anggaran ditetapkan berdasarkan perkiraan kegiatan di masa depan, tepat idaknya perkiraan tersebut bergantung pada pengalaman serta kepandaian estimator/proyektor, jika terjadi ketidaktepatan dapat mengganggu jalannya rencana, koordinasi dan pengawasan.

Kata Kunci: Akuntansi keuangan, Implementasi Anggaran, Transparansi

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan kecamatan diajukan mencoba untuk bekerja pada pengaturan dan kemampuan perakitan mekanik di sub-daerah dalam administrasi moneter. Pencatatan ikhtisar fiskal menyajikan data tentang klarifikasi atau ikhtisar pemeriksaan nilai suatu hal yang dimasukkan dalam Laporan Pengakuan Rencana Keuangan.

Menurut (Zeny Antika et al., 2020) Dalam administrasi moneter di tingkat kelurahan, tanggung jawab pengawasan cadangan kelurahan sangat penting untuk mengurangi dugaan komponen politik dari cadangan desa yang memiliki rencana dari pemerintah pusat dan negara teritorial. Pembagian aset sub-daerah pada tahun

2019 ini disertai penataan perspektif yang tepat agar tidak menjadi aparatur politik dan kepentingan individu. Penunjukan cadangan kelurahan harus bertanggung jawab dan lugas untuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Cadangan desa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan daerah untuk latihan penguatan daerah di kecamatan yang dipilih dalam Musyawarah Penataan Pembangunan (Musrenbang).

Penunjukan Aset Dana sesuai Peraturan No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa 5% aset yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada Kelurahan, salah satunya untuk Penguatan Daerah. Untuk mengawasi dan mengelola Rencana Alokasi Keuangan Desa (AAD), Jemaat mekanis kota seharusnya memenuhi beberapa pedoman sebagaimana ditunjukkan oleh Perwal No. 34 Tahun 2015 terutama Lurus, Dapat Diandalkan, Teknokratis, dan Partisipatif. Hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh keterbatasan Town Gadget dalam memonitoring AAK agar sesuai dengan fokus dan fokus dari AAK itu sendiri.

Menurut (Oktaviani & Suryadi, 2022) Demikian juga, menurut perspektif peraturan, administrasi moneter kantor kecamatan secara keseluruhan belum menyelesaikan catatan pembukuan sesuai pedoman akuntansi yang baik.

Misalnya, menjelang akhir tahun tidak melakukan perubahan (stock taking) stok, dan estimasi devaluasi sumber daya. Hal ini menunjukkan tidak adanya informasi dan kapasitas dari pemerintahan desa, khususnya bagian uang dalam mengawasi dana kantor kecamatan. Kemudian lagi, persiapan perangkat kantor tentang tanggung jawab administrasi keuangan kantor kecamatan.

Sebagian besar kantor kecamatan belum siap untuk menyelesaikan tanggung jawab secara bebas. Hal ini jelas disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena gadget tidak memahami konfigurasi kewajiban yang dilakukan oleh otoritas publik. Hal ini disebabkan organisasi dan tanggung jawab apayang dilakukan tidak pas dengan prinsip yang relevan, dan menghabiskan sebagian besar hari untuk menyelesaikannya. Hal ini tentunya akan mengembalikan pengeluaran aset berikutnya yang juga akan berdampak pada tertundanya pelaksanaan program perbaikan kota.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir?
2. Bagaimanakah Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan pada Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan pada Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Dilihat dari hipotesis organisasi, organisasi dianggap sebagai berbagai kesepakatan (*nexus of contact*) antara investor (*administrator*) sebagai perkumpulan yang memiliki aset moneter dan supervisor (*spesialis*) sebagai pihak yang dipercaya untuk mengawasi dan mengendalikan aset keuangan.

Menurut sudut pandang wilayah publik, otoritas publik sebagai spesialis memiliki komitmen untuk memberikan tanggung jawab Kantor untuk setiap gerakan dan latihan yang menjadi tanggung jawab kepada kepala memiliki hak istimewa untuk meminta pertanggungjawaban.

Teori Entitas

Menurut (Jati, 2019) Dalam pandangan area publik, unit otoritas publik adalah substansi pengumuman yang tidak hanya berkewajiban untuk melakukan pembukuan tetapi sekaligus diharapkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan moneter (Peraturan 1/2004). Dengan demikian, tujuan umum pengungkapan moneter area publik adalah untuk menyerahkan tanggung jawab pengelolaan aset yang bergantung pada otoritas publik sebagai elemen area publik dan untuk memberikan data yang berharga secara independen.

Untuk menyetujui standar tanggung jawab dan keterusterangan, laporan keuangan pemerintah harus diserahkan segera dan siap sesuai dengan pedoman pembukuan pemerintah. Untuk memberikan konfirmasi bahwa ringkasan fiskal otoritas publik diperkenalkan secara wajar dari semua sudut material sesuai dengan pedoman pembukuan pemerintah, laporan anggaran otoritas publik harus ditinjau oleh pihak luar yang bebas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sifat ringkasan anggaran adalah merek dagang subjektif yang membuat data dalam laporan fiskal berharga untuk pengambilan keputusan bagi kliennya. Sesuai dengan pedoman pembukuan pemerintah, penentu utama sifat laporan anggaran substansi pemerintah adalah signifikan, padat, serupa, dan wajar (PP 71/2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah melakukan wawancara kepada informan. Penelitian ini menggunakan teknik subjektif yang digunakan dalam tinjauan ini, khususnya dengan memimpin pertemuan dengan para saksi. Wawancara diarahkan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menghubungkan data dengan masalah

eksplorasi.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Informasi penting, informasi yang diperoleh dengan memimpin penelitian lapangan langsung.

Menurut jenisnya dalam penelitian ini memanfaatkan informasi penting, yaitu informasi spesifik yang diperoleh dengan hasil pemeriksaan persepsi yang langsung berhubungan dengan masalah tersebut.

Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah: Wawancara, untuk lebih spesifik dengan memimpin siklus pertukaran atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek yaitu camat atau pegawai kantor camat.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir yang beralamat di Jl. Besar Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir, Kota Batu Bara, Sumatera Utara. Penelitian ini akan memakan waktu untuk waktu beberapa bulan, khususnya sejak tanggal 26-Januari-2022 sampai dengan tanggal 26- Februari-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kantor Camat Lima Puluh Pesisir

Wilayah Lima Puluh Pesisir merupakan sub-wilayah di Wilayah Kota Batubara Sumatera Utara. Ikhtisar sub-wilayah dan sub-wilayah/kota di Batubara Rule, Sumatera Utara, Indonesia memiliki 12 sub-region, 10 sub- region, dan 141 kota. Luas wilayahnya mencapai 904,96 km² dan berpenduduk 412.992 jiwa (2018) dengan kepadatan penduduk 456 jiwa/km².

Tabel 1.1 Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Negara	Indonesia
Provinsi	Sumatra Utara
Kabupaten	Batu Bara
Populasi	-
Total	31,226 jiwa
Luas	73,88 km ²

Sumber : kantor camat

Sejak pemekaran dari induk lima puluh kota pada tanggal 23 Mei 2018. Camat pertama bernama bapak LUKMAN, SH. Selanjutnya di pimpin oleh PLT Camat Bapak RENOLD ASMARA,AP, SH. Kemudian sampai saat ini di pimpinoleh Bapak Camat SYAHRIZAL, SH.

Wilayah Lima Puluh Pesisir adalah sebuah sub-daerah di Rezim Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia. Sub-wilayah ini diperpanjang dari lima puluh sub-

wilayah pada tahun 2017.

Kecamatan dapat dilihat sebagai alat lokal dari suatu rezim/kabupaten (perangkat provinsi merupakan komponen pembantu daerah dan DPRD dalam melakukan segala keperluan pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan kabupaten). Memperhatikan pedoman Pasal 209 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi yang menyatakan bahwa Pemerintahan Kota Rojojampi di Rezim Banyuwangi menyelenggarakannya.

Camat dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh perangkat daerah dan diserahkan kepada pejabat/ketua melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tanggung jawab sebagai camat kepada pejabat/pimpinan balai kota melalui sekretaris daerah merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif. Arti melalui tidak berarti bahwa kepala daerah merupakan bawahan langsung dari sekretaris daerah, mengingat pada dasarnya kepala daerah berada langsung di bawah pimpinan dinas/walikota.

Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Menurut (Budiarto et al., 2020) Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur bahwa penata usahaan keuangan kantor kecamatan harus melaksanakan standar tata kelola moneter sesuai dengan pedoman materi. Administrasi moneter kota harus melalui serangkaian pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab.

Pemkot harus memiliki SDM yang mumpuni agar penatausahaan aset- aset kantor kecamatan dapat diselesaikan dengan baik. Kemampuan pemerintah kota dapat di peroleh melalui landasan pendidikan yang cukup serta melalui persiapan yang matang di bidang keuangan. Selain itu, wawasan pada bidang keuangan juga diperlukan oleh otoritas kota agar membantu tanggung jawab dalam mengawasi cadangan dana desa kantor kecamatan.

Menurut (Alfiani & Estiningrum, 2021) Administrasi moneter kantor kecamatan dapat dipahami dengan asumsi kebutuhan faktor pendukung terpenuhi. Banyak faktor yang dapat mendukung pemerintahan desa yang lebih baik, termasuk tanggung jawab, keterusterangan, sistem pembukuan keuangandes, dll. Eksplorasi ini dipimpin dengan memanfaatkan aplikasi kerangka moneter desa, dimana aplikasi ini membantu para pengawas keuangan desa agar lebih mudah. Dalam aplikasi ini, laporan dan arsip administrasi keuangan desa yang terkait dengan organisasi dapat diperoleh dengan memasukkan input administrasi keuangan desa sesuai pedoman materi.

Tabel 1.2 Rincian Belanja Daerah

No	Keterangan	Anggaran (Rp)
----	------------	-----------------

	<i>Last names & Last names/ Short Title</i>
1.	Belanja Operasi 2.532.874.100.00
2.	Belanja Modal 46.742.811.00
	Surplus / (Defisit) (257.961.691.100)

Menurut (Ria Herlina, Taufeni Taufik, 2021) Ada beberapa faktor yang diingat untuk mempengaruhi tanggung jawab administrasi moneter provinsi. Untuk mulai dengan, variabel keterusterangan. Tanggung jawab administrasi moneter teritorial adalah komitmen untuk menjawab pertemuan yang berbeda apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan , tanggung jawab administrasi moneter provinsi juga mencakup tanggung jawab kepada setiap individu yang terlibat, dengan tingkat keterusterangan yang lebih tinggi dapat memperluas tingkat tanggung jawab administrasi moneter daerah di kemudian hari pada Kantor Wilayah Lima Puluh Pesisir.

Kedua, kapabilitas yang merupakan kesanggupan, informasi, keahlian, dan perilaku yang diperlukan oleh setiap perwakilan ASN untuk dapat menjalankan kewajibannya dengan berhasil (Pedoman Ulama Penguatan Majelis Mekanik Negara dan Perubahan Administratif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020). Dalam hal ASN mempunyai kemampuan yang besar, demonstrasi pencemaran nama baik yang dapat menghambat ke daerah dan negara tidak akan selesai dengan bekerja ASNs untuk organisasi tersebut.

Ketiga, kerangka pembukuan moneter yang meliputi pencatatan, pencirian, penguraian, penjumlahan pertukaran atau peristiwa moneter, serta pengumuman moneter dalam rangka pelaksanaan APBD. Pembukuan moneter pemerintah lingkungan sangat penting untuk pembukuan area publik, yang mencatat dan melaporkan semua pertukaran yang terkait dengan dana teritorial yang ditentukan untuk memberikan data moneter yang berharga untuk mengatur dan mengawasi dana pemerintah dan bekerja dengan perintah yang memaksa atas semua sumber daya, kewajiban, dan cadangan nilai.

Pengertian Anggaran

Menurut (Robby & Angery, 2021) Pengertian anggaran yakni sebuah susunan rencana yang sistematis dimana didalamnya berisi seluruh kegiatan perusahaan, berupa unit/kesatuan moneter dalam periode tertentu.

Anggaran ditetapkan berdasarkan perkiraan kegiatan di masa depan, tepat idaknya perkiraan tersebut bergantung pada pengalaman serta kepandaian estimator/proyektor, jika terjadi ketidaktepatan dapat mengganggu jalannya rencana, koordinasi dan pengawasan.

Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu jenis penyelenggaraan moneter negara yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari rencana keuangan pendapatan, rencana keuangan konsumsi, dan rencana pengeluaran penunjang. Rencana keuangan yang tertuang dalam Peraturan Camat Lima Puluh Pesisir Batu Bara adalah rencana Belanja Penggunaan Perwakilan, rencana Belanja Penggunaan Produk, dan rencana

Belanja Penggunaan Modal.

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2016 terdapat pada tabel 1.2 rincian belanja daerah, Akibatnya, berapa banyak rencana keuangan yang tidak dapat dikonsumsi dirinci dalam latihan berikut:

Tabel 1.3 Rincian Belanja Daerah

No	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja	1.620.726.222.00	1.513.281.100.00
	-Belanja Operasi	1.541.854.100.00	1.468.621.210.00
	-Belanja Modal	46.741.812.00	22.540.000.00
	Total belanja	3.209.322.134.00	3.004.442.310.00

Sumber : Data Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Menurut (Akuntansi, 2020) Setiap tanda administrasi moneter daerah dievaluasi dengan memiliki tiga aturan utama untuk data, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan idealitas pengungkapan data administrasi moneter daerah.

Batas menunjukkan bahwa data tentang administrasi moneter lokal yang disengaja dapat diakses di situs pemerintah terdekat. Dapat diakses menyiratkan bahwa data dibuat dapat diakses oleh masyarakat umum (publik) di situs oleh pemerintah lingkungan. Keterbukaan menunjukkan bahwa data yang dapat diakses dapat diunduh oleh masyarakat umum, secara keseluruhan, data dapat dengan mudah dipulihkan oleh orang-orang pada umumnya tanpa melalui sistem yang membingungkan.

Menurut (Rosiana & Mahardika, 2017) Kemampuan (SDM) merupakan komponen yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Salah satunya ditemukan pada waktu yang dihabiskan untuk melakukan perolehan tenaga kerja dan produk, dimana terdapat keterbatasan SDM dalam pengaturan persiapan pelaksanaan tender dan tidak adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip perolehan tenaga kerja dan produk yang dibawa. tentang retensi lamban dari rencana pengeluaran.

Menurut (Gustina, 2021) Penggunaan kerangka pembukuan moneter yang bertanggung jawab dengan kontrol yang tepat dan terkoordinasi akan benar-benar berdampak pada sifat laporan moneter pemerintah. Salah satu upaya untuk mengakui administrasi moneter negara yang besar adalah akomodasi laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan menerapkan norma-norma pembukuan pemerintah.

Tabel 1.4 Jumlah Anggaran Belanja

No	Nama Kegiatan	Anggaran ITahun	Realisasi
	1	2	3
1.	Belanja Tidak Langsung	1.208.238.100.00	1.228.708.460.00
2.	Penyediaan dan Peningkatan Admistrasi Perkantoran Keuangan	84.081.000.00	82.216.640.00
3.	Musrembang Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	5.010.100.00	4.874.000.00
4.	Fasilitas , monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah	16.620.000.00	27.453.000.00
5.	Bekerja pada Kapasitas Pengarahan dan Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan	23.825.000.00	23.825.000.00
6.	Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi PKK Kecamatan LPP	14.220.000.00	14.220.000.00
		220.100.000.00	220.100.000.00
		20.877.000.00	20.877.000.00
	Total	1.266.764.645.100	1.674.721.200.000

Sumber : Data Keuangan Kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Penggunaan kerangka pembukuan moneter yang ditetapkan dalam Pedoman Pembukuan Pemerintah (SAP) merupakan aturan pembukuan yang harus diterapkan untuk memperoleh laporan moneter yang berkualitas. Ikhtisar keuangan adalah laporan terkoordinasi tentang uang terkait dan posisi perdagangan yang dilakukan oleh komponen terorganisir.

Pelaksanaan

Dalam tahap Pelaksanaan Aset Desa Pengurus di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Pemkot berperan dalam melaksanakan pencadangan desa para pengurus karena Pemkot melakukan latihan sesuai bidangnya. Majelis mekanik kota semuanya mengambil bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya sekretaris sebagai pelaksana khusus yang dibantu dengan panel sesuai bidangnya,

misalnya dalam hal uang dibantu oleh petugas keuangan, sebagai Sejahtera perbaikan ada dewan kemajuan sebagai individu yang mendorong pelaksanaan kemajuan program dari Aset Desa, dan untuk masalah bisnis. Organisasi keuangan sekretaris desa dibantu oleh pemodal.

Dalam tahap pelaksanaan pengawasan kantor kecamatan cadangan, pemerintah desa bermain memiliki dampak, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kelompok penasihat moneter sebagai agen latihan di bidang moneter, peningkatan dewan pengawas sebagai agen latihan di bidang moneter. bidang kemajuan, dan berbagai panel sebagai penyelenggara atau pelaksana latihan sesuai bidangnya, misalnya dewan umum, kepala badan publik, dinas bantuan sosial pemerintah, dan pemodal sebagai agen latihan organisasi keuangan desa (Desa, 2019).

Pelaporan

Pada tahap pengumuman dewan toko kota, peran pemerintah desa berdampak dalam pembuatan laporan pengakuan APBDes dan laporan organisasi pemerintah. Hal ini ditegaskan dengan adanya Pemkot sebagai pelaksana senam yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam penyusunan laporan pengakuan APBDes harus ada Pemkot sebagai individu yang melakukan senam sesuai bidangnya. Selain itu, kepala desa menyampaikan laporan penerimaan APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas adalah komitmen untuk memberikan kewajiban atau untuk menjawab dan memaknai pameran dan kegiatan seorang individu/unsur yang sah/pimpinan suatu perkumpulan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kedudukan untuk menuntut informasi dan kewajiban. Tanggung jawab moneter akan menjadi kewajiban sehubungan dengan kehormatan moneter, pengungkapan dan konsistensi dengan peraturan dan pedoman.

Akuntabilitas harus lugas, tidak memihak, lugas dan kreatif sebagai dorongan untuk perubahan dalam administrasi kantor-kantor pemerintah melalui strategi dan prosedur penyegaran untuk memperkirakan pelaksanaan dan perencanaan laporan pertanggungjawaban. Undang-undang tidak resmi Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa organisasi terkait uang ialah kumpulan kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan, tanggung jawab, dan pengelolaan dana daerah. Tanggung jawab adalah premis perincian keuangan di pemerintahan mengingat hak publik untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan tentang berbagai aset dan penggunaannya (Direview & Diterima, 2019).

Maqashid Syariah Pada Akuntansi

Ibnu `Asyur mendefinisikan Akuntansi Syariah dalam *Last names & Last names / Short Title* Maqashid Syariah adalah pentingnya memperhatikan aspek pada akuntansi atau pencatatan, yang terjadi di sebagian besar pengaturan-Nya (bukan dalam peraturan khusus). Menurut Al Fasi, Maqashid Syariah adalah tujuan atau misteri Allah SWT dalam setiap peraturan syariat. Untuk situasi ini, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dengan memahami masalahnya dan menjauhi mafsadah darinya. Adanya Maqashid Syariah telah digambarkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur`an yang artinya “Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāsid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an”.

Maqasid syariah sebagai tujuan atau inspirasi yang mendorong syariah untuk mengakui kepuasan sejati bagi umat manusia melalui jaminan agama, jiwa, jiwa, keturunan dan harta. Maqashid syariah dapat berisi penjelasan yang Cermat atau Akuntansi, M. R. (2020). intensif yang ditunjukkan dengan tanda yang disusun melalui apa yang dibuat atau melalui kepentingannya. Dalam Al-Hadits lainnya juga masuk akal betapa pentingnya pembukuan dalam mengawasi sumber daya atau kekayaan.

Terdapat juga pada surah An-Nisa 29 memaknai pelarangan mengonsumsi luapan dengan cara batil, sedangkan pada reff 58 didekati untuk menyampaikan permintaan kepada individu yang mampu mendapatkannya dan bertindak secara normal. Dalam Surah Al-Muthaffifin ref 1-3 menggambarkan kemunduran individu yang menipu untuk mengurangi timbangan, salah satunya dikaitkan dengan hadits yang memaknai keadaan yang akan terjadi pada individu pada saat disiplin di alam agung. . Hadits itu masuk akal “Seseorang tidak akan bergeser kedua kaki manusia (anak adam) pada hari kiamat dari sisi Tuhannya, hingga dia ditanya tentang lima perkara yaitu tentang umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta amalan dari ilmu yang dimiliki” (HR. at-Tirmidzi no. 2416 dan HR. Al- Thabrani no. 9772).

KESIMPULAN

Tata kelola harus melaksanakan standar administrasi moneter sesuai pedoman yang relevan. Administrasi moneter desa harus melalui serangkaian pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab. Setiap tanda administrasi moneter daerah dievaluasi dengan menggunakan tiga ukuran data utama, yaitu aksesibilitas spesifik, keterbukaan, dan idealitas pengungkapan data administrasi moneter daerah..

Penggunaan kerangka pembukuan moneter yang bertanggung jawab dengan kontrol yang tepat dan terkoordinasi akan benar-benar mempengaruhi sifat laporan moneter pemerintah. Salah satu upaya untuk mengakui administrasi moneter negara yang besar adalah akomodasi laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip pembukuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, M. R. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tpkd) Di Indonesia. 20(2), 185–204.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>
- Desa, D. (2019). No Title. 2(2), 119–144.
- Direview, D., & Diterima, D. (2019). *JURNAL AKADEMI AKUNTANSI 2019 Volume 2 No.1* |106. 2(1), 106–123.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. 10(1), 56–64.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145>
- Oktaviani, R. N., & Suryadi, A. (2022). Pelatihan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuok KabupatenKampar. 1(1), 69–73.
- Ria Herlina, Taufeni Taufik, A. N. (2021). Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4, 419–433.
- Robby, K., & Angery, E. (2021). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, DanAkuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Rosiana, A., & Mahardika, A. S. (2017). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. *Sikap*, 2(1), 20–34.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>